

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Kawasan Afrika sangat kaya akan sumber daya alam (SDA) berupa minyak, gas alam, berlian, emas, serta bahan tambang dan sumber mineral lainnya. Namun di sisi lain ada kenyataan bahwa kawasan Afrika mudah terkena konflik, pertumbuhan ekonominya pun juga terancam oleh konflik korupsi yang masih merajalela di kalangan penyelenggara negara. Tata kelola pemerintahan yang buruk, konflik etnis yang sering terjadi, pertumbuhan penduduk yang pesat, kelaparan, kemiskinan berkepanjangan, hal itulah yang masih membuat pembangunan di Afrika terbelakang, begitu juga menghambat pertumbuhan ekonomi di Afrika.

Namun disamping karena terdapat masalah yang dihadapi oleh sebagian besar dari negara-negara di Afrika, potensi SDA seperti mineral dan energi yang dimiliki oleh Afrika juga telah mengundang minat negara-negara besar untuk terlibat hubungan kerjasama agar kebutuhan negaranya akan SDA dapat terpenuhi, sehingga dari keterlibatan hubungan kerjasama tersebutlah mulai muncul kebijakan-kebijakan negara-negara lain untuk berkontribusi mengatasi permasalahan di Afrika tidak lain juga untuk dapat mempertahankan kepentingan nasionalnya. Salah satu sumber kontribusi yaitu berasal dari Uni Eropa, karena Uni Eropa telah memiliki hubungan kerjasama dengan negara-negara di Afrika, dan salah satu hubungan yang kuat serta bersejarah adalah dengan negara Afrika

Selatan. Menurut sumber dalam situs resmi Komisi Eropa, hubungan kerjasama yang kuat antara Uni Eropa dan Afrika Selatan sudah berkembang sejak lahirnya demokrasi Afrika Selatan tahun 1994. (European Commission, 2015) Sejarah apartheid dimana adanya isolasi perekonomian yang pernah dialami oleh Afrika Selatan pada masa silam meninggalkan berbagai masalah negara seperti kemiskinan, tingginya pengangguran, dan berbagai masalah lainnya yang menjadi faktor penghambat bagi perekonomiannya semenjak berakhirnya apartheid yang ditandai dengan lahirnya demokrasi di Afrika Selatan, hal tersebut membuat Afrika Selatan berada pada kondisi yang dapat dikatakan sulit, karena dihadapkan pada kesiapan negara yang masih lemah dalam menghadapi era perekonomian yang baru (perekonomian bebas). Dan sejak saat itulah Uni Eropa mulai mengembangkan kerjasama dan kontribusinya dengan Afrika Selatan.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh K.J.Holsti, apabila timbul berbagai masalah nasional, regional, atau global yang memerlukan perhatian dari banyak negara. Dalam kebanyakan kasus, sejumlah pemerintahan saling mendekati dengan penyelesaian yang diusulkan, merundingkan atau membahas masalah, mengemukakan bukti teknis untuk menyetujui atau penyelesaian atau lainnya, dan mengakhiri perundingan dengan perjanjian atau pengertian tertentu yang menguatkan kedua belah pihak. Proses ini disebut kolaborasi atau kerjasama. Istilah kerja sama (*collaboration*), dapat menimbulkan satu citra akan suatu organisasi internasional yang bekerja keras menyelesaikan masalah-masalah biasa, atau ahli-ahli teknis dalam lapangan yang membantu pihak lain meningkatkan produktivitasnya. (K.J.Holsti, 1988 : 209) Dalam perundingan atau

perjanjian yang ditujukan untuk menyelesaikan masalah maupun bantuan teknis dalam membantu pihak lain meningkatkan produktivitasnya, organisasi internasional melakukan sebuah perumusan kebijakan umum yang mencakup rencana-rencana dan usul-usul yang tidak dikonsepsikan oleh pemerintah nasional tetapi oleh pejabat sipil internasional. (K.J.Holsti, 1988: 210)

Uni Eropa atau *European Union* merupakan gabungan negara-negara demokratis Eropa yang memiliki komitmen bekerjasama untuk mewujudkan perdamaian serta kemakmuran. Uni Eropa melalui Komisi Eropa, bertanggungjawab dalam mengatur bantuan Masyarakat Eropa (ME) untuk pembangunan, yang juga dikenal sebagai *EC aid*. Bantuan Masyarakat Eropa dibagi dan diatur melalui program regional sesuai dengan tujuan Masyarakat Eropa di wilayah tertentu yang biasanya tertuang dalam sebuah perjanjian kerjasama dengan negara-negara tertentu, salah satunya adalah perjanjian Cotonou, yang merupakan dasar hukum pemberian bantuan antara Masyarakat Eropa dengan 77 negara di kawasan Afrika, Karibia, dan Pasifik yang menandatangani perjanjian ini. (Elliza & Harto, 2013: 3,4)

Perjanjian kemitraan antara negara-negara Afrika, Karibia, dan Pasifik ini ditandatangani di ibu kota Benin, Cotonou pada 23 Juni 2000. Perjanjian Cotonou menawarkan kerangka hubungan kerjasama Uni Eropa dalam pembangunan ekonomi, sosial dan budaya bagi negara-negara Afrika, Karibia dan Pasifik atau *Africa, Caribia, and Pacific (ACP)*. Target utama dalam perjanjian ini adalah mengurangi dan memberantas kemiskinan di negara-negara *ACP* dalam jangka panjang, kerjasama ini juga harus berkontribusi pada perdamaian dan keamanan

serta stabilitas demokrasi dan politik negara-negara *ACP*. Dalam hal ini, para mitra perjanjian harus bertindak bersama-sama untuk secara bertahap mencapai *Millennium Development Goals (MDGs)*. Perjanjian Cotonou ini didasarkan pada kesetaraan antara mitra dan kepemilikan strategi pembangunan, perjanjian yang ditandatangani tahun 23 Juni 2000 ini memiliki jangka waktu 20 tahun yang dapat direvisi setiap lima tahun. Kemitraan antara Uni Eropa dengan negara-negara *ACP* dijalankan berdasarkan pada beberapa pilar, yaitu yang pertama penguatan dalam dimensi politik, strategi pembangunan dan pemberantasan kemiskinan yang mempromosikan pengembangan ekonomi dan pembangunan sosial dan masyarakat, kerjasama regional dan integrasi, serta kerjasama ekonomi dan perdagangan. (EUR-Lex Web site, 2014) Sejak tahun 2000 tersebut, Perjanjian Cotonou ini telah menggantikan perjanjian preferensial sebelumnya, yaitu *Konvensi Lome* sejak tahun 1975, dan hingga sekarang Perjanjian Cotonou sudah mengalami dua kali revisi.

Isi dari Perjanjian Cotonou tersebut adalah "*Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan akan bertujuan mendorong integrasi secara bertahap pada negara-negara ACP (Africa, Caribia, Pacific) ke dalam ekonomi dunia, dengan memperhatikan pilihan ekonomi dunia dan memperhatikan pilihan politik dan prioritas pembangunan mereka, sehingga meningkatkan pembangunan berkelanjutan dan berkontribusi pengentasan kemiskinan di negara-negara ACP*". (Euorepan Commission, 2015: 47) Dalam hal kekuatan ekonomi, Uni Eropa sudah menjadi aktor besar di tingkat Internasional. Kebijakan Umum Komersial menjadi kebijakan utama masyarakat yang akan dilaksanakan. Uni

Eropa merupakan blok perdagangan utama dan berkontribusi pada isu-isu ekonomi dunia. (Nello, 2005: 71) Kebijakan tersebut diwujudkan oleh *EU* melalui bantuan kerjasama diberbagai bidang seperti pendidikan, perdagangan, pemberantasan kemiskinan, lingkungan, keamanan, pembangunan demokrasi dan hak asasi manusia, maupun penerapan *good governance*. (HI Fisip Undip Web site, 2015) Dalam hal ini, komunitas Eropa merumuskan *good governance* sebagai pengelolaan kebijakan sosial ekonomi yang masuk akal, pengambilan keputusan yang demokratis, transparansi pemerintahan dan pertanggungjawaban keuangan yang memadai, penciptaan lingkungan yang bersahabat dengan pasar bagi pembangunan, langkah-langkah untuk memerangi korupsi, penghargaan terhadap aturan hukum, penghargaan terhadap HAM, kebebasan pers dan ekspresi. (Departemen Pekerjaan Umum : Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam Modul Good Governance, 2007 : 19)

Diantara negara-negara Afrika, Afrika Selatan lah yang memiliki ekonomi paling maju. Baik dalam energi, transportasi, dan komunikasi, barang pertanian dan industri. (Msabaha & Shaw, 1984: 141) Afrika Selatan termasuk negara berproduksi menengah dimana merupakan sebuah negara yang menjadi target pasar bagi negara lain serta memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah seperti mineral, batubara, besi, tembaga, emas, dan platinum. Industri pertambangan menjadi industri yang paling menonjol di Afrika Selatan. (Swanson, 2004: 1-2) Disamping itu, Afrika Selatan juga menjadi salah satu pasar yang paling canggih dan menjanjikan yang ada dunia. Kombinasi dari adanya infrastruktur ekonomi yang baik serta pasar ekonomi yang berkembang pesat telah

melahirkan lingkungan investasi kewirausahaan yang dinamis dengan banyak keuntungan kompetitif global dan peluang. (Galileo Resources Website, 2015) Dan posisi strategis dari Afrika Selatan tersebut lah yang juga menjadi bagian dari salah satu alasan mengapa Uni Eropa turut melibatkan dirinya dalam kerjasamanya dengan Afrika Selatan.

Ada kenyataan bahwa orang Barat menginginkan bahan baku Afrika, minyak Rusia, kedelai dan biofuel Brasil, nuklir India, serta demokrasi dan pemerintahan yang baik di seluruh dunia. (Schouten, 2012: 44) Pernyataan tersebut terkait dengan usaha Uni Eropa melakukan kerjasama dengan Afrika Selatan karena adanya kepentingan nasional Uni Eropa yang ingin dicapai, yaitu kepentingan industri akan melimpahnya SDA yang dimiliki oleh Afrika Selatan. Dan kepentingan Afrika Selatan sendiri adalah agar Uni Eropa dapat membantu memberantas kemiskinan demi tercapainya pembangunan nasional dengan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi Afrika Selatan melalui Perjanjian Cotonou ini. *European Development Fund (EDF)* atau Dana Pembangunan Eropa digunakan sebagai sumber utama pendanaan Uni Eropa terhadap proses pembangunan ekonomi di Afrika Selatan. Perekonomian dan perdagangan serta bantuan pembangunan menjadi aspek utama yang ditekankan dalam Perjanjian Cotonou, sehingga strategi dan kebijakan kontribusi Uni Eropa untuk pembangunan perekonomian di Afrika Selatan melalui dasar Perjanjian Cotonou akan berpengaruh bagi Perekonomian Afrika Selatan itu sendiri.

B. Pokok Permasalahan

Bagaimana pengaruh Perjanjian Cotonou terhadap Perekonomian di Afrika Selatan 2000-2014 ?

C. Kerangka Pemikiran

Untuk menganalisa dan menjelaskan mengenai pengaruh Perjanjian Cotonou terhadap Perekonomian Afrika Selatan, maka penulis menggunakan teori Pembangunan Konvensional.

1. Teori Pembangunan Konvensional (*Conventional Development*) oleh Walter S.Jones

Dewasa ini, definisi pembangunan ekonomi yang paling banyak diterima adalah : suatu proses di mana pendapatan per kapita suatu negara meningkat selama kurun waktu yang panjang, dengan catatan bahwa jumlah penduduk yang hidup di bawah “garis kemiskinan absolut” tidak meningkat dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang. Yang dimaksud dengan proses adalah berlangsungnya kekuatan-kekuatan tertentu yang saling berkaitan dan mempengaruhi. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi. Proses pembangunan menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan (*growth plus change*) dalam: Pertama, perubahan struktur ekonomi: dari pertanian ke industri atau jasa. Kedua, perubahan kelembagaan, baik lewat regulasi maupun reformasi kelembagaan itu sendiri. (Kuncoro, 1997: 17)

Krisis yang terjadi di negara dunia ketiga memiliki perbedaan mendasar dibandingkan krisis pembangunan di dua belahan dunia yang lain. Terdapat dua pola krisis pembangunan di Dunia Ketiga, yaitu yang terjadi di Afrika dan di Asia. Di Afrika, krisis pembangunan tetap bermuara pada masalah kelaparan. Kondisi ini diperparah dengan masalah etnis yang sering menyulut peperangan antarsuku dan negara di Afrika. Kelaparan yang terjadi secara simultan dengan krisis etnis ini menambah permasalahan pembangunan menjadi semakin sulit dipecahkan. (Kuncoro, 1997: 81) Dalam kasus ini, selain kelaparan, kemiskinan pun juga merupakan masalah yang menghambat pertumbuhan ekonomi Afrika Selatan.

Kemiskinan yang banyak terjadi sekarang ini mempunyai penyebaran yang tidak seimbang baik antarwilayah yang ada di Dunia Ketiga maupun antarnegara yang ada di wilayah-wilayah tersebut. Sub Sahara Afrika (meliputi semua negara di sebelah selatan gurun Sahara termasuk Afrika Selatan, namun tidak termasuk Mauritius, Reunion, dan Seychelles) mempunyai penduduk dengan jumlah lebih kecil dibandingkan Asia Selatan, namun terdapat tingkat ketimpangan yang masih cukup besar. (Kuncoro, 1997: 102)

Proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di negara berkembang terhambat akibat rendahnya angka produktivitas serta tingginya tingkat keborosan sosial dan inefisiensi. Oleh sebab itu, pokok pemikiran para teori konvensional adalah bagaimana dan di mana negara berkembang dapat menambah modal yang diperlukannya untuk meningkatkan produktivitas agar mampu bangkit dari lingkaran kemiskinan. (Jones, 1992 : 219)

Menurut para teoritis konvensional, perekonomian akan mencapai titik “lepas landas” menuju pertumbuhan mandiri bila terdapat akumulasi modal yang cepat. Tetapi kebanyakan negara berkembang hanya dapat mencapai tingkat tabungan dan investasi yang rendah karena kemiskinan itu sendiri dan adanya berbagai bentuk pemborosan dan inefisiensi. Bahkan ketika surplus tercipta, surplus itu cenderung dihabiskan dalam bentuk-bentuk konsumsi yang tidak perlu daripada dalam bentuk investasi untuk pertumbuhan. Ada lima macam pemborosan yang amat menghambat perkembangan: (1) pertumbuhan penduduk yang tak terkendali, (2) ledakan urbanisasi, (3) pengeluaran militer yang berlebihan, (4) konsumsi barang-barang mewah yang tidak perlu, (5) korupsi para pejabat, dan (6) inefisiensi manajemen. (Jones, 1992: 220)

Maka dari itu, untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi di negara berkembang, negara-negara Barat menyalurkan aliran modalnya kepada negara berkembang, yang dilakukan dengan cara :

Bantuan Ekonomi Luar Negeri

Yang masih menjadi permasalahan bagi negara berkembang adalah rendahnya angka produktivitas yang menyebabkan terhambatnya aliran modal, ditambah lagi dengan adanya masalah diantaranya seperti korupsi, ledakan penduduk, manajemen yang tidak efisien, yang menyebabkan hasil surplus pendapatan negara habis hanya untuk menangani masalah tersebut dan cenderung tidak fokus terhadap pertumbuhan dan investasi.

Dalam menghadapi masalah tersebut, menurut Walter S.Jones, “*Cara pemecahan yang mendasar, menurut pandangan konvensional, adalah menemukan sumber modal baru dan menggunakan modal yang ada dengan lebih efektif.*” Sehingga dalam mendorong pembangunan, negara-negara maju memiliki empat bentuk bantuan terhadap negara berkembang yang dijadikan cara untuk mentransfer modal, diantaranya (1) bantuan (utang) luar negeri, (2) perdagangan luar negeri, (3) investasi langsung luar negeri, dan (4) bantuan teknis. (Jones, 1992 : 232-233)

(1) Bantuan luar negeri adalah transfer sumber-sumber keuangan yang dimiliki atau dijamin oleh suatu negara ke satu atau lebih negara berkembang, baik dalam bentuk dana langsung atau dalam bentuk subsidi komoditi dan barang oleh negara donor. Bantuan ini dapat datang langsung dari sebuah negara atau dari organisasi internasional.(Jones, 1992: 233)

(2) Perdagangan luar negeri dianggap oleh aliran pembangunan konvensional sebagai unsur-unsur utama bagi modernisasi. Karena kemandirian penuh tidak mungkin terwujud di sebagian besar ekonomi, perolehan sumber-sumber barang luar negeri (impor) dan pasar luar negeri untuk komoditi-komoditi ekspor merupakan elemen-elemen penting bagi ekspansi ekonomi. Perdagangan luar negeri merupakan sumber modal baru yang penting. Kepastian pasar ekspor juga penting dalam menentukan volume produk yang akan diproduksi dan selanjutnya harga jualnya di pasar dalam dan luar negeri. Perdagangan luar negeri sangat penting bagi penyeimbang neraca perdagangan perekonomian berkembang. (Jones, 1992:237-238)

(3) **Investasi Langsung Luar Negeri**, merupakan salah satu bentuk transfer modal dari negara maju ke negara berkembang. Sebuah negara berkembang dalam hal ini harus dapat menarik perhatian baru bisnis dunia untuk menanamkan modalnya di negaranya. Dan ditegaskan lagi bahwa investasi yang terkendali dapat merangsang pertumbuhan dengan cepat. Keuntungan yang didapat dari investasi asing ini beberapa diantaranya adalah *peluang lapangan pekerjaan*, *transfer teknologi* bagi subkontraktor lokal karena produksi diintegrasikan dalam perekonomian lokal, *substitusi impor* dimana dengan adanya investasi asing sering membantu penyeimbangan neraca pembayaran negara berkembang dengan memungkinkan negara tersebut menghasilkan sendiri barang-barang yang sebelumnya diimpor, *perluasan pasar* dimana perusahaan asing membawa koneksi pasar internasional yang mendatangkan kesempatan terus mengalirnya modal dan ekspansi ekspor, dan *perencanaan* dimana investor internasional sangat ahli memperhitungkan keuntungan komparatif produksi lokal di pasaran dunia, dan mereka dapat membant dalam menemukan sektor-sektor unggul yang ideal bagi pembangunan ekonomi nasional yang terencana. (Jones, 1992 : 242-243)

(4) **Bantuan Teknis**, sebagian besar kegiatan penelitian dan pengembangandi dunia berlangsung di negara-negara kaya. Agar kemajuan teknologi tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang dan agar keuntungan penemuan sains dapat untuk semua manusia, maka sebuah cara harus ditemukan untuk memudahkan apa yang disebut sebagai migrasi pengetahuan transnasional. (Jones, 1992 : 243)

Afrika Selatan dalam hal ini termasuk negara Dunia Ketiga (negara berkembang) dimana merupakan negara yang masih mengalami berbagai masalah seperti kelaparan, kemiskinan yang berkepanjangan, korupsi, ledakan pertumbuhan penduduk, dan berbagai masalah pemborosan lainnya yang masih menyebabkan ketimpangan. Masalah-masalah tersebutlah yang masih menghambat pembangunan ekonomi di Afrika Selatan. Sehingga, dalam teori pembangunan konvensional ini, satu-satunya solusi untuk mengatasi permasalahan di Afrika Selatan adalah dengan menemukan sumber modal baru dan menggunakannya dengan lebih efektif, sumber modal tersebut berasal dari negara-negara Barat yang menjadi pihak yang membantu pembangunan di Afrika Selatan. Kerjasama internasional yang sudah terjalin antara Afrika Selatan dengan Uni Eropa, memberikan peluang bagi Afrika Selatan dalam menerima sumber modal baru, dimana dalam kerjasamanya dengan Afrika Selatan, Uni Eropa membantu pembangunan ekonomi Afrika Selatan melalui dasar-dasar kebijakan bantuan ekonomi yang ada dalam Perjanjian Cotonou, dimana isi perjanjiannya adalah untuk memberantas kemiskinan di negara Afrika Selatan dengan tujuan pembangunan dan meningkatkan perekonomian di Afrika Selatan melalui perdagangan dengan menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan *European Development Fund (EDF)* atau Dana Pembangunan Eropa yang digunakan sebagai sumber utama pendanaan kontribusi pembangunan Uni Eropa ke Afrika Selatan, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut ditujukan untuk membantu pembangunan ekonomi di Afrika Selatan lebih efektif, yang mana sesuai dengan pemikiran dalam teori ini bahwa untuk

mendorong pembangunan di negara berkembang sebuah sumber modal baru harus digunakan lebih efektif.

Dari keempat bentuk bantuan ekonomi luar negeri tersebut, dalam hubungan antara Afrika Selatan dan Uni Eropa melalui Perjanjian Cotonou ini, 3 bentuk diantaranya yaitu bantuan luar negeri, perdagangan luar negeri, dan investasi luar negeri merupakan bentuk yang lebih memiliki kesesuaian dengan isi Perjanjian Cotonou dimana Uni Eropa dalam perjanjian tersebut menekankan pada aspek bantuan luar negeri (untuk pendidikan, lapangan pekerjaan, dsb), perekonomian dan perdagangan dalam membantu pembangunan di Afrika Selatan. Dengan adanya Perjanjian Cotonou tersebut, Uni Eropa menyalurkan *European Development Fund (EDF)* atau Dana Pembangunan Eropa kepada Afrika Selatan melalui kerjasama ekonomi dan perdagangan serta pemberian bantuan pembangunan untuk pendidikan dan lapangan pekerjaan yang mana disalurkan dalam bentuk bantuan perdagangan luar negeri, investasi luar negeri, dan juga bentuk bantuan dana langsung/komoditi lainnya sehingga memberikan peluang besar bagi Afrika Selatan dalam memperbaiki perekonomiannya.

D. Hipotesa

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dipaparkan di atas oleh penulis dengan teori yang digunakan, maka dapat diambil hipotesa sebagai berikut :

Dengan adanya Perjanjian Cotonou, Uni Eropa dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi di Afrika Selatan melalui *EDF (European Development Fund)* yang disalurkan dalam bentuk bantuan ekonomi

luar negeri (bantuan luar negeri, perdagangan luar negeri, investasi luar negeri) sehingga berpengaruh bagi Afrika Selatan untuk dapat memperbaiki perekonomiannya.

E. Tujuan Penulisan

Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini, penulis memiliki beberapa tujuan, di antaranya adalah :

1. Mengamati dan menganalisa pengaruh Perjanjian Cotonou terhadap perekonomian di Afrika Selatan pada tahun 2000-2014.
2. Mengetahui strategi dan kebijakan Uni Eropa dalam kontribusinya terhadap perbaikan ekonomi di Afrika Selatan pada tahun 2000-2014.
3. Mengetahui pengaruh yang ditimbulkan dari strategi dan kebijakan kontribusi Uni Eropa melalui Perjanjian Cotonou terhadap perekonomian di Afrika Selatan pada tahun 2000-2014.

F. Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian terhadap suatu permasalahan sangat diperlukan agar memperjelas hal-hal pokok permasalahan sebenarnya. Berdasarkan topik yang akan dibahas dan untuk meneliti pengaruh Perjanjian Cotonou terhadap perekonomian di Afrika Selatan pada tahun 2000-2014 , maka penulis memfokuskan penelitian pada aspek ekonomi yang terkait dengan kebijakan dan strategi bantuan ekonomi Uni Eropa melalui Perjanjian Cotonou yang ditujukan untuk memajukan perekonomian di Afrika Selatan melalui dinamika hubungan kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Uni Eropa dengan Afrika Selatan

pada rentang waktu mulai tahun 2000 dimana menjadi tahun diterapkannya Perjanjian Cotonou hingga tahun 2014.

G. Metode Penelitian

Jonathan Sarwono dalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif* menjelaskan bahwa “Koleksi data merupakan tahapan dalam proses penelitian yang penting, karena hanya dengan mendapatkan data yang tepat maka proses penelitian akan berlangsung sampai peneliti mendapatkan jawaban dari perumusan masalah yang sudah ditetapkan, dan dengan teknik *sampling* yang benar, kita sudah mendapatkan strategi dan prosedur yang akan kita gunakan dalam mencari data di lapangan” (Sarwono, 2006 : 123)

Dalam penulisan dan penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode analisa kualitatif. Dimana metode ini dilakukan dengan menggunakan teknik data atau literatur. Teknik pengumpulan data atau literatur dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka yang diambil dari data-data sekunder. Dalam bukunya, Jonathan Sarwono mengatakan, “Penelitian sekunder menggunakan bahan yang bukan dari sumber pertama sebagai sarana untuk memperoleh data atau informasi untuk menjawab masalah yang diteliti” (Sarwono, 2006:17) Data-data sekunder tersebut terdapat dalam berbagai dokumen seperti buku, surat kabar jurnal-jurnal ilmiah maupun sumber dari internet yang berhubungan langsung dengan masalah yang diangkat dalam penelitian. Setelah data-data didapat kemudian dilanjutkan untuk diarahkan dan disesuaikan terhadap permasalahan yang diangkat dari penulisan penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan dan penyusunan penelitian ini, penulis memaparkan 5 bab yang disertai dengan penjabaran pembahasan setiap babnya secara lebih terperinci dalam susunan sub-sub bab. Pembahasan pada setiap bab yang dipaparkan akan saling berhubungan satu sama lain sehingga akan menghasilkan karya tulis yang sistematis.

Sistematika penulisan penelitian adalah sebagai berikut :

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi hal-hal yang berkaitan tentang latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, kerangka pemikiran, hipotesa, tujuan penelitian, lingkup penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang Uni Eropa dan sejarah hubungannya dengan Afrika Selatan

Bab III berisi tentang Afrika Selatan dan kondisinya sebelum Perjanjian Cotonou, termasuk sejarah latar belakang Afrika Selatan., potensi ekonomi dan kendala serta kondisi perekonomian sebelum Perjanjian Cotonou.

Bab IV berisi tentang dasar Perjanjian Cotonou, termasuk kebijakan kontribusi Uni Eropa melalui Perjanjian Cotonou terhadap perekonomian di Afrika Selatan.

Bab V berisi tentang pengaruh dari kebijakan kontribusi Uni Eropa melalui Perjanjian Cotonou terhadap perekonomian Afrika Selatan.

Bab VI berisi tentang kesimpulan yang merupakan rangkuman dari semua pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya.